

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DALAM KONTEKS PENJAMINAN MUTU DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI MASA DEPAN

Oleh :

Danny Ivanno Ritonga, S. Pd

Abstrak

Telah kita ketahui dalam abad milinium ini ciri utamanya adalah terjadinya globalisasi pada setiap aspek kehidupan. Globalisasi mengandung arti terjadinya keterbukaan, kesejagatan, dimana batas-batas negara tidak lagi menjadi penting. Salah satu yang menjadi trend dan merupakan ciri globalisasi adalah adanya persamaan hak. Dalam konteks pendidikan, persamaan hak itu tentunya berarti bahwa setiap individu berhak mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya tanpa memandang bangsa, ras, latar belakang ekonomi, maupun jenis kelamin. Dengan adanya kesamaan hak ini, terjadi kehidupan yang penuh dengan persaingan karena dunia telah menjadi sangat kompetitif. Karena itu, mau tidak mau setiap orang mesti berusaha untuk menguasai ilmu dan teknologi agar dapat ikut dalam persaingan, dan jika tidak, maka kita akan ditinggalkan. Terkait dengan itu, pendidikan mesti dapat menjawab tantangan tersebut. Dengan kata lain, pendidikan harus menyediakan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sebagai bekal mereka memasuki persaingan dunia yang kian hari semakin ketat itu. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, adalah pertama, bagaimana pendidikan yang dapat menjawab tantangan di atas dapat dirancang?, kedua, dengan adanya persamaan hak dalam mendapatkan pendidikan yang terbaik, bagaimanakah upaya-upaya pendidikan yang dapat mengakomodasi berbagai dimensi pembaharuan, sehingga peserta didik mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas dalam era global ini? dan ketiga, bagaimanakah profesionalisme guru tersebut disiapkan?

Kata kunci : *Penjaminan Mutu Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Berwawasan Masa Depan, Profesionalisme Guru*

PENDAHULUAN

Pendidikan berwawasan masa depan diartikan sebagai pendidikan yang dapat menjawab tantangan masa depan, yaitu suatu proses yang dapat melahirkan individu-individu yang berbekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk hidup dan berkiprah dalam era globalisasi.

Komisi Internasional bagi Pendidikan Abad ke 21 yang dibentuk oleh UNESCO melaporkan bahwa di era global ini pendidikan dilaksanakan dengan bersandar pada empat pilar pendidikan, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together* (Delors, 1996). Dalam *learning to know* peserta didik belajar pengetahuan yang penting sesuai

dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Dalam *learning to do* peserta didik mengembangkan keterampilan dengan memadukan pengetahuan yang dikuasai dengan latihan (*law of practice*), sehingga terbentuk suatu keterampilan yang memungkinkan peserta didik memecahkan masalah dan tantangan kehidupan. Dalam *learning to be*, peserta didik belajar menjadi individu yang utuh, memahami arti hidup dan tahu apa yang terbaik dan sebaiknya dilakukan, agar dapat hidup dengan baik. Dalam *learning to live together*, peserta didik dapat memahami arti hidup dengan orang lain, dengan jalan saling menghormati, saling menghargai, serta memahami tentang adanya saling ketergantungan (*interdependency*). Dengan demikian, melalui keempat pilar pendidikan ini diharapkan peserta didik tumbuh menjadi individu yang utuh, yang menyadari segala hak dan kewajiban, serta menguasai ilmu dan teknologi untuk bekal hidupnya.

Dalam Jalal dan Supriadi (2001) disebutkan tiga acuan dasar pengembangan pendidikan di Indonesia dalam era reformasi untuk menjawab tantangan global, yaitu acuan filosofis, acuan nilai kultural, dan acuan lingkungan strategis.

Acuan filosofis, didasarkan pada abstraksi acuan hukum dan kajian empiris tentang kondisi sekarang serta idealisasi masa depan. Secara filosofis pendidikan perlu memiliki karakteristik: (a) mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban; (b) mendukung diseminasi dan nilai keunggulan, (c) mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan dan keagamaan; dan (d) mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai-nilai moral. Kesemua ini tidak terlepas dari cita-cita pembentukan masyarakat Indonesia Baru, yakni apa yang disebut dengan masyarakat madani.

Pendidikan kita harus pula memiliki *acuan nilai kultural* dalam penataan aspek legal. Tata nilai itu sendiri bersifat kompleks dan berjenjang mulai dari jenjang nilai ideal, nilai instrumental, sampai pada nilai operasional. Pada tingkat ideal, acuan pendidikan adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keunggulan. Pada tingkat instrumental, nilai-nilai yang penting perlu dikembangkan melalui pendidikan adalah otonomi, kecakapan, kesadaran berdemokrasi, kreativitas, daya saing, estetika, kearifan, moral, harkat, martabat dan kebanggaan. Pada

tingkat operasional, pendidikan harus menanamkan pentingnya kerja keras, sportifitas, kesiapan bersaing, dan sekaligus bekerjasama dan disiplin diri.

Acuan lingkungan strategis mencakup lingkungan nasional dan lingkungan global. Lingkungan nasional ditandai dengan dua hal yang substansial yaitu: masih berlanjutnya krisis dimensional yang menerpa bangsa ini, dan tuntutan reformasi secara total yang belum berjalan secara baik dan optimal. Lingkungan nasional meliputi perubahan demografis termasuk didalamnya penyebaran penduduk yang tidak merata dan keberhasilan KB, pengaruh ekonomi yang tidak merata sehingga penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat, pengaruh sumber kekayaan alam yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan yang baik, pengaruh nilai sosial budaya di era global ini, dimana munculnya nilai-nilai baru di masyarakat seperti kerja keras, keunggulan, dan ketepatan waktu, pengaruh politik yang sejak era reformasi terasa sangat labil, serta pengaruh ideologi dimana pendidikan ideologi perlu terkait dengan yang universal. Lingkungan nasional yang saat ini masih dalam situasi reformasi, bertujuan untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat. Secara nasional acuan strategis ini mengandung arti bahwa pendidikan kita harus dapat menjawab tantangan reformasi dan membawa negeri ini keluar dari berbagai krisis.

Lingkungan global ditandai antara lain dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga kita tidak bisa menjadi warga lokal dan nasional saja, tetapi juga warga dunia. Lingkungan strategis sangat berpengaruh bagaimana pendidikan masa depan tersebut hendaknya dirancang.

Sebagai implikasi dari globalisasi dan reformasi tersebut, terjadi perubahan pada paradigma pendidikan. Perubahan tersebut menyangkut, *pertama*: paradigma proses pendidikan yang berorientasi pada pengajaran dimana guru lebih menjadi pusat informasi, bergeser pada proses pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran dimana peserta didik menjadi sumber (*student center*). Dengan banyaknya sumber belajar alternatif yang bisa menggantikan fungsi dan peran guru, maka peran guru berubah menjadi fasilitator. *Kedua*, paradigma proses pendidikan tradisional yang berorientasi pada pendekatan klasikal dan format di dalam kelas,

bergeser ke model pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti pendidikan dengan sistem jarak jauh. *Ketiga*, mutu pendidikan menjadi prioritas (berarti kualitas menjadi internasional). *Keempat*, semakin populernya pendidikan seumur hidup dan makin mencairnya batas antara pendidikan di sekolah dan di luar sekolah.

Kondisi ini mengharuskan pendidikan menerapkan berbagai prinsip yang sangat mendasar seperti penerapan standar mutu sehingga kita bisa bersaing dengan dunia global, dan penggunaan berbagai cara belajar dengan mendayagunakan sumber belajar. Bila kita cermati ketiga acuan di atas merupakan dasar hukum dan operasional pengembangan pendidikan masa depan. Dalam pembangunan pendidikan ke depan ini, ketiga acuan itu merupakan dasar dalam mengembangkan cetak biru (*blueprint*) pendidikan nasional.

PEMBAHASAN

Kajian Konseptual Mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan tersebut adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan.

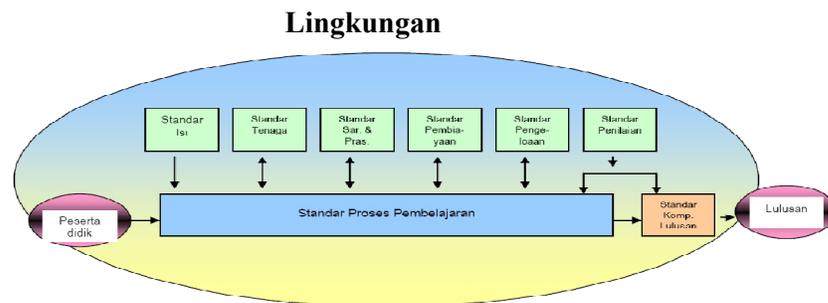
Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.

Paradigma pengajaran yang telah berlangsung sejak lama lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Seperti telah disebutkan pada pendahuluan, dewasa ini paradigma tersebut telah bergeser menuju paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan bagi

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang didasarkan paradigma baru tersebut, diperlukan acuan dasar bagi setiap satuan pendidikan yang meliputi serangkaian kriteria dan kriteria minimal sebagai pedoman, yang saat ini dikenal dengan *delapan standar mutu nasional pendidikan*.

Tujuan standar mutu pendidikan ditetapkan adalah untuk menjamin mutu

proses transpormasi, mutu instrumental dan mutu kelulusan, yang meliputi : (1) *standar isi*, (2) *standar proses*, (3) *standar kompetensi lulusan*, (4) *standar pendidik dan tenaga kependidikan*, (5) *standar sarana dan prasarana*, (6) *standar pengelolaan*, (7) *standar pembiayaan*, dan (8) *standar penilaian pendidikan*. Konsep tersebut di atas dapat diwujudkan pada diagram berikut :



Gambar 1: Keterkaitan antara Aspek-Aspek Standar Mutu

Dalam kaitan dengan itu, Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, sejak tahun 1920an telah mengumandangkan pemikiran bahwa pendidikan pada dasarnya adalah *memanusiakan manusia*. Untuk itu suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya, *tidak ada pendidikan tanpa dasar cinta kasih*. Dengan demikian

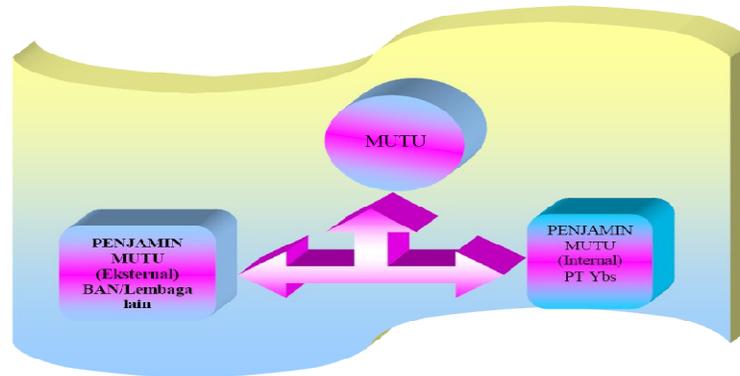
pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, serta menjadi anggota masyarakat yang berguna. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiannya dan mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Metode pendidikan yang paling tepat adalah *sistem among* yaitu metode pembelajaran yang berdasarkan pada

asih, asah dan asuh. Sementara itu prinsip penyelenggaraan pendidikan perlu didasarkan pada “*Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*”.

Mengingat bahwa pendidikan itu merupakan suatu sistem dengan komponen-komponen yang saling berkaitan, maka keseluruhan sistem harus sesuai dengan ketentuan yang diharapkan atau standar. Untuk itu masing-masing komponen dalam sistem harus pula sesuai dengan standar yang ditentukan bersama. Hal ini mesti dilakukan dalam kaitan terjadinya penjaminan mutu pendidikan itu sendiri, karena; *penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.* Bila dikaitkan dengan pengelolaan pendidikan, penjaminan mutu yang dimaksud adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Untuk itu, dalam

PP 19/2005 delapan standar tersebut di atas merupakan aspek-aspek yang harus memenuhi standar mutu dalam kaitan dengan penjaminan mutu suatu lembaga.

Sehubungan dengan kerangka konsep di atas, pada awal perkembangan pendidikan, masyarakatlah yang lebih berperan dalam menentukan standar mutu tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya dengan meluasnya penyelenggaraan pendidikan formal pemerintah lebih berperan dalam menentukan standar mutu tersebut. Dengan demikian, konsep penjaminan mutu dapat ditinjau dari dua aspek yaitu : (1) *aspek deduktif* ; dimana lembaga pendidikan/sekolah mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya, dan (2) *aspek induktif*; dimana lembaga pendidikan/sekolah, mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* (kebutuhan kemasyarakatan, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan profesional). Konsep di atas dapat divisualisasi dalam gambar berikut :



Gambar 2 : Konsep Penjaminan Mutu

Dalam kaitan dengan penjaminan mutu seperti diagram di atas, kualifikasi pendidik merupakan salah satu Standard yang harus dipenuhi sesuai dengan PP 19/2005. Dengan terpenuhinya kualifikasi pendidik diharapkan pengelolaan proses pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi dan menyenangkan (I2M3).

Implementasi Kebijakan Pendidikan Berwawasan Masa Depan

Terjadinya pergeseran pendidikan nasional seperti telah dikupas di depan, mengakibatkan adanya berbagai kebijakan pendidikan yang relevan dengan itu. Beberapa kebijakan yang menonjol, antara lain dalam bidang manajemen pendidikan yaitu desentralisasi pendidikan (melalui program manajemen pendidikan berbasis sekolah), dalam bidang kurikulum yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis

kompetensi (KTSP), dalam proses pembelajaran ada program percepatan belajar (learning acceleration). Kebijakan-kebijakan baru ini perlu mendapat perhatian yang serius sampai pada tataran guru sebagai ujung tombak.

Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

Hasil studi yang dilakukan Bank Dunia, yang diberi judul *Education in Indonesia: from Crisis to Recovery* (1998) antara lain menghasilkan simpulan bahwa ada tiga faktor penyebab ketidakefisienan manajemen sekolah, yaitu: (1) pada umumnya kepala sekolah, terutama sekolah negeri memiliki otonomi yang sangat terbatas dalam manajemen sekolah dan dalam memutuskan alokasi sumber-sumber, (2) banyak kepala sekolah yang mempunyai keterampilan yang terbatas dalam manajemen sekolah, (3) partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah sangat terbatas, hal

ini antara lain dapat dilihat dari ketidakmampuan kepala sekolah dalam memobilisasi dukungan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS), yang dicanangkan sejak tahun 2000 merupakan respon terhadap kebutuhan penyesuaian terhadap konsep demokrasi dan otonomi. Inti dari MPBS adalah pemberdayaan masyarakat sebagai komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Jika sebelumnya sekolah seolah-olah merupakan *milik* pemerintah dalam artian bahwa semua tanggungjawab penyelenggaraannya menjadi beban pemerintah, kini masyarakat menjadi komponen penting dalam tanggung jawab itu. Dengan pelibatan masyarakat, diharapkan timbul suatu kesadaran bahwa keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat dan pemerintah. *Sharing* ini antara lain telah diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah, dimana didalamnya terlibat penyelenggara sekolah, orangtua murid, maupun komponen masyarakat lainnya. Dalam perjalanannya sampai saat ini, Komite Sekolah sudah mulai menjalankan fungsinya dan diharapkan berkontribusi yang cukup signifikan

dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Ke depan, MPBS diharapkan bukan hanya berbagi dalam fungsi sebagai penyandang dana, namun pelibatan orangtua dan masyarakat diharapkan juga terjadi. Di negara-negara maju seperti AS, MPBS telah lama dilakukan, kerjasama sekolah dengan orangtua dan masyarakat juga dilakukan dalam proses pembelajaran. Kedatangan orangtua ke sekolah untuk membantu guru dalam PBM, dokter yang memberi masukan dalam suatu *proyek* dalam pelajaran biologi misalnya, bukanlah pemandangan yang aneh.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Penggunaan Kurikulum 1994 di lapangan mengalami berbagai paradoks, antara lain menyangkut universalisasi pendidikan disatu pihak, dan tuntutan akan mutu yang tinggi dipihak lain. Setelah itu, ada upaya pembaharuan kurikulum, dan salah satu upaya adalah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Dengan kurikulum yang berbasis kompetensi ini, ukuran terpenting keberhasilan peserta didik adalah penguasaan mereka terhadap standar kompetensi. Pendekatan kurikulum berbasis kompetensi ini (saat ini terkenal dengan KTSP), dilakukan

melalui identifikasi dan penentuan kemampuan dasar lulusan/ Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang dijabarkan menjadi Standar Isi (SI) yang memuat, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Berdasarkan SI tersebut masing-masing Satuan Pendidikan menyusun kurikulumnya dengan menjabarkan menjadi Materi, Pengalaman Belajar, Indikator. Terdapat peluang yang sangat besar sekolah/guru mengembangkan kurikulumnya sendiri (berorientasi pada SI yang telah ditetapkan dalam Permen Diknas, maupun mengembangkan dan memasukkan keunggulan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya). Untuk KTSP ini bisa dibicarakan tersendiri secara lebih mendalam.

Program Anak Berbakat / Percepatan Belajar

Dalam rangka realisasi pendidikan yang berwawasan masa depan, perhatian harus diprioritaskan pada pengklasifikasian peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, maupun minat mereka. Ini sangat penting agar pendidikan yang diikuti benar-benar bermakna. Beberapa program telah dilakukan terkait dengan kondisi peserta didik yang variatif ini, yaitu melalui sistem akreditasi, sistem sekolah unggulan, maupun program

umum plus seperti program akselerasi belajar.

Diketahui bahwa lembaga pendidikan yang ada adalah pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pada jenjang sekolah pendidikan atas, pendidikan formal dibedakan antara SMA dan SMK. Pada hakekatnya di jenjang SMA peserta didik diberikan pengalaman belajar dalam rangka penguasaan sains, teknologi, dan pengalaman belajar yang dapat membekali mereka melanjutkan pendidikannya ke PT. Sedangkan pada jenjang SMK peserta didik diarahkan pada penguasaan keterampilan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga tamatan SMK diharapkan langsung dapat masuk ke dunia kerja.

Perkiraan Ward (dalam Semiawan, 1997) di Indonesia terdapat 1,57 % anak yang berbakat tinggi (highly gifted), dan 10 % yang berbakat sedang (moderately gifted). Kedua kelompok anak ini berbakat akademik (academic talented) atau keberbakatan intelektual. Anak-anak berbakat ini merupakan aset nasional yang sangat penting, karena mereka memiliki interes intelektual dan perspektif masa depan yang jauh lebih baik dari anak kebanyakan, baik secara genetis

maupun dalam kecepatan tindakan. Dengan kelebihan ini, diharapkan tenaga dan pikiran mereka dapat membawa berbagai pembaharuan dalam bidang keilmuan, maupun perubahan kearah perbaikan kehidupan masyarakat, seperti apa yang telah dilakukan Edison (sang penemu listrik) yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Sesuai dengan keberadaan kedua kelompok ini sebagai kelompok yang "berbeda" dengan anak normal lainnya, dan sesuai pula dengan misi pendidikan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi mereka, maka kelompok ini perlu mendapatkan pendidikan yang dapat mengakomodasi kelebihan mereka. Program untuk mereka dapat berupa pendidikan khusus, atau pendidikan umum untuk anak berbakat (saat ini dikenal dengan program kelas percepatan). Berkaitan dengan itu, beberapa asumsi yang mendasari alasan kenapa anak berbakat perlu mendapatkan pendidikan yang berbeda dengan anak-anak lainnya, adalah : (a) anak berbakat secara kualitatif berbeda dengan anak lainnya, (b) pendidikan khusus bagi mereka sangat menguntungkan, karena sesuai dengan kemampuan mereka, (c) suatu program

harus dilaksanakan berdasarkan model instruksional yang terarah, (d) program anak berbakat harus lebih menekankan perkembangan kreativitas dan proses berpikir tingkat tinggi, (e) metode pembelajaran bagi anak berbakat lebih berorientasi pada pendekatan induktif.

Pendidikan anak berbakat harus diwarnai oleh penekanan pada aktivitas intelektual, kecepatan dan tingkat kompleksitas sesuai dengan kemampuan yang tinggi. Sehubungan dengan itu, jika anak-anak berbakat ditangani dengan program akselerasi, maka ada dua hal penting yang harus diperhitungkan, yaitu: (a) dalam program akselerasi, beban belajar yang oleh anak-anak biasa dapat diselesaikan dalam tiga tahun, maka oleh anak-anak berbakat ini hanya dibutuhkan waktu dua tahun. Ini berarti terjadi proses percepatan dalam belajar, (b) percepatan ini juga harus mengandung arti kualitatif, yaitu bahwa aktivitas belajar mereka ditekankan pada aktivitas intelektual tinggi. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa, dalam perilaku intelektual, aspek teoretis dan tingkat abstraksi anak-anak berbakat menunjukkan karakteristik mental yang baik dalam melihat hubungan yang bermakna, tanggap mengaitkan asosiasi logis, mudah mengadaptasikan prinsip

abstrak situasi konkret, serta mampu menggeneralisasikan.

Metode belajar yang relevan adalah metode penemuan (*discovery learning*) seperti yang dikembangkan oleh Piaget dan Bruner, dan metode induktif. Dalam *discovery learning* aspek kognitif berkembang melalui penemuan dan pengembangan hipotesis, bukan dengan cara duduk, diam, dengar, dan catat. *Discovery learning* memberikan tantangan bagi kemampuan berpikir abstrak yang tinggi, dan pelibatan secara aktif dalam menemukan jawaban dan tantangan tersebut. Dengan cara ini, terjadilah penanjakan dinamis dari kehidupan mental yang disebut eskalasi (Semiawan, 1997).

Pembelajaran kognitif induktif dideskripsikan melalui empat istilah, yaitu: (a) *inquiry*, (b) *problem solving*, (c) *discovery learning*, dan (d) *scientific method*. Pembelajaran induktif memiliki rasional yang kuat untuk meningkatkan: (a) penggunaan inteligensia secara optimal dengan memanfaatkan fungsi kedua belahan otak secara penuh, (b) kemampuan peserta didik untuk mengarahkan diri dan tanggungjawab untuk memperoleh kemajuan dalam mencapai sasaran jangka panjang dan jangka pendek, (c) kemampuan untuk

mensintesis informasi, konsep, dan membuat generalisasi, dan (d) kemampuan mentransfer belajar dalam situasi berbeda.

Profesionalisme Guru

Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang pasti dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari aspek kehidupan yang lain. Pendidikan merupakan masalah semua orang, karena melalui sentuhan pendidikan proses pemanusiaan itu terjadi. Dalam kaitan dengan itu, pada dasarnya manusia mempunyai potensi menjadi baik, seperti halnya juga memiliki kecenderungan berbuat tidak baik, maka diperlukan upaya untuk mewujudkan harkat dan martabat kemanusiaan yang tertinggi pada masing – masing individu. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Manusia tidak dengan sendirinya memanusia, seperti binatang dengan sendirinya membinatang. Maka dari itu manusia harus mendapatkan sentuhan pendidikan, serta hidup di lingkungan masyarakat manusia, untuk dia bisa menjadi manusia. Pendidikan merupakan upaya sadar yang diarahkan untuk mencapai perbaikan disegala aspek kehidupan. Dalam upaya pendidikan itulah keterlibatan orang tua (sebagai pendidik pertama, utama dan

kodrat), orang dewasa lainnya, tokoh masyarakat serta guru, sangatlah nyata terlihat.

Guru sebagai pendidik memangku jabatan profesional, jabatan tersebut adalah suatu profesi yang sangat berperan dalam pendidikan formal. Guru dapat dikatakan menempati posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan proses belajar pada pendidikan formal. Guru-lah yang merancang, mengarahkan dan mengelola proses belajar mengajar dalam rangka (untuk) mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan sudah tentunya untuk kesejahteraan subyek didik. Dalam konteks itu, guru tidak hanya membina anak untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan secara kognitif saja, tapi lebih jauh dari itu adalah untuk dapat membina nilai kemanusiaan pada anak. Dengan kata lain, disamping mencapai instructional effects, pencapaian nurturant effects sangat penting diupayakan, sehingga empat pilar pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO yaitu : *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*, bisa diimplementasikan secara bersamaan dan atau silih berganti. Maka dari itu kita membutuhkan guru yang profesional. Dalam hubungan dengan

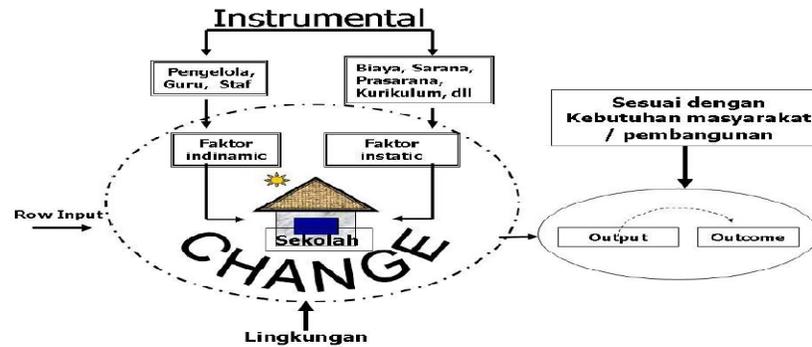
butir di atas, meskipun dalam kenyataan menunjukkan perlakuan kita terhadap guru masih cukup jauh dari yang diharapkan, tetapi agaknya tidak sulit untuk menyepakati bahwa tugasnya adalah teramat penting. Secara makro, tugas guru berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan paling menentukan kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa. Dalam hubungan ini, tampaknya memang ada kecenderungan untuk memandang permasalahan secara kurang jernih. Kesalahan perhitungan oleh seorang insinyur bangunan dalam merancang bangunan atau kesalahan terapi yang diberikan oleh seorang dokter segera disadari pentingnya oleh masyarakat luas berhubung dengan kedramatisan dampaknya, bangunan bertingkat ambruk atau pasien meninggal. Walaupun tidak langsung terlihat, agaknya juga tidak sulit untuk menyepakati, bahwa dampak negatif kesalahan pendidikan juga tidak kalah seriusnya. Kegawatan tersebut dapat berupa terbunuhnya bakat yang secara potensial dapat memberi sumbangan bagi pembangunan dan kelestarian serta kejayaan bangsa, sampai dengan perusakan diri sendiri (karena kebiasaan hidup yang salah dsb) maupun

perusakan lingkungan, yang kesemuanya itu juga tidak diperbaiki.

Bertolak dari keharusan menjaga keseimbangan antara kedaulatan murid dan otoritas guru, serta keserasian antara penumbuhan kemampuan mempertanyakan dan kesediaan menerima nilai lingkungan, maka peranan kunci guru di dalam interaksi pendidikan adalah melakukan pengendalian yang pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga segi. Peranan kunci itu adalah: (a) secara sistematis mengupayakan pembentukan kemandirian murid dengan mengatur pemberian kesempatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan kemampuannya, (b) pemupukan kemampuan murid dalam pengambilan keputusan dengan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang relevan, dan (c) penyediaan sistem dukungan yang memungkinkan melaksanakan berbagai alternatif bentuk kegiatan belajar yang mencerminkan kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan yang semakin meningkat dengan kata lain, guru memang harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyediakan kondisi belajar yang kondusif untuk terjadinya proses

pembelajaran pada murid. Pengendalian di sini perlu diartikan secara khas, sejak awal tujuannya adalah pemandirian murid, bukan penjinakannya. Oleh karena itu, harus kokoh terpatri dalam kesadaran guru bahwa segala kelebihannya apabila dibandingkan dengan murid adalah bersifat sementara dan bukan hakiki. Bila dikaji lebih jauh dari situasi yang telah dikemukakan pada butir – butir di atas, jelas akan kita pertanyakan profil guru bagaimana kita harapkan untuk dapat mengelola proses pembelajaran dalam rangkaantisipasi generasi muda kita untuk memasuki gerbang abad ke 21, yang penuh dengan gejolak kemajuan itu. Bila untuk itu, seandainya kita menjawab bahwa guru kita harus profesional (yang dicirikan pada proses kemampuan pembelajaran diri), tetap kita harus pertanyakan bagaimana ciri umum itu dan dengan jalan bagaimana kita meningkatkan hal tersebut.

Bila digambarkan dalam suatu diagram bagaimana peran guru dalam proses pembelajaran maupun dalam kaitan dengan sistem persekolahan sehingga variabilitas perkembangan sistem tersebut dapat optimal terjadi adalah sbb:



Dalam pembahasan atau analisis selanjutnya dalam kaitan dengan globalisasi, satu asumsi yang harus dipegang bahwa : untuk masa yang akan datang kita tidak bisa mengatakan apa yang pasti akan terjadi, tapi kita hanya bisa mengatakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari menganalisa apa yang terjadi, dan kecenderungan-kecenderungan yang mungkin akan terjadi. Maka dari itu guru harus disiplin menjalankan tugas profesinya, dia tidak boleh kehilangan idealisme profesinya/keguruannya. Bertolak dari itu tampaknya profil guru yang kita harapkan adalah :

- a) Beriman dan taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa,
- b) Memiliki dasar profesional yang kuat, baik yang menyangkut kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial (yang ditetapkan sebagai empat kompetensi guru di Indonesia). Untuk indikator ini meliputi

keterampilan / keahlian dalam bidangnya yang diperoleh lewat pendidikan dan pelatihan yang intensif dari lembaga tertentu,

- c) Memiliki tanggung jawab atas layanan yang diberikan demi untuk kemaslahatan orang lain (peserta didik),
- d) Memiliki kemampuan dasar untuk berperilaku inovatif, kreatif dan pembelajaran diri. Dengan dimilikinya tiga kemampuan dasar ini akan terjadi pengembangan diri secara berlanjut sehingga dapat beradaptasi secara berlanjut dengan perubahan yang terjadi. Memang, di samping pengembangan diri dapat dilakukan secara personal dapat dilakukan pula secara lebih terencana melalui organisasi profesi.

Dalam kaitan dengan itu, salah satu variabel yang dianggap dominan berpengaruh dengan “keterjadian” profesional guru tersebut, adalah kedisiplinan seseorang dalam

melakukan, mempertahankan dan meningkatkan *unjuk kerja profesionalnya*.

Sedangkan profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Ini berarti pekerjaan atau jabatan itu harus dikerjakan oleh orang yang sudah terlatih/disiapkan untuk melakukan pekerjaan itu. Sedangkan profesionalisme merupakan suatu pandangan yang dianut oleh seorang tentang pekerjaannya atau dalam melakukan pekerjaannya. Guru merupakan suatu profesi, yang secara hukum telah diakui dan secara “*expertise*” memang tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak disiapkan untuk itu. Dalam UU tentang Guru pada Ketentuan Umum dikatakan bahwa : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya pada ayat 3 pasal 1 disebutkan bahwa, profesi guru adalah pekerjaan dan atau jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang didapatkan melalui

kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Kompetensi adalah bersifat personal dan kompleks serta merupakan suatu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi yang mencakup *pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai*, yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut.

Secara lebih detail dalam UU Guru telah dicantumkan mengenai : prinsip profesional guru, kualifikasi dan kompetensi guru, tugas hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan profesi guru. Bila disimak secara lebih umum dapat dikatakan bahwa ciri – ciri suatu profesi, menyangkut tiga hal itu yaitu :

- 1) Didasarkan pada keilmuan tertentu (*expertise*)
- 2) Pemberian jasa didasarkan pada tanggung jawab (*responsibility*)

demi untuk kemaslahatan orang lain/ penerima jasa, dan

3) Keterikatan pada suatu kesejawatan.

Hal tersebut di atas (khususnya butir 1) diterjemahkan oleh Departemen (DIKNAS) dengan acuan bahwa guru yang profesional adalah guru yang menguasai standar kompetensi yang terdiri dari empat standar kompetensi yaitu: standar I : Penguasaan Bidang Studi, Standar II yaitu: Pemahaman tentang Peserta Didik, Standar III yaitu: Penguasaan Pembelajaran yang Mendidik, dan Standar IV yaitu: Pengembangan Kepribadian dan Keprofesional-an.

PENUTUP

Telah dibahas tantangan pendidikan kita untuk masa depan. Semua tantangan globalisasi dan krisis multidimensional yang berkepanjangan memang telah terjadi di negara kita. Mau tidak mau dunia pendidikan harus bahu membahu meningkatkan diri agar bisa menjawab tantangan tersebut. Dalam kaitan dengan itu, sesungguhnya pendidikan kita menghadapi kendala yang tak kurang seriusnya dibandingkan dengan tantangan tersebut.

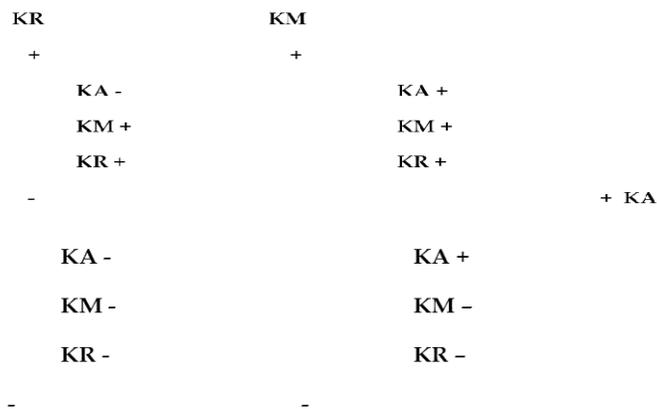
Dalam kaitan dengan itu, minimal dapat diidentifikasi dua kendala pokok yaitu: *pertama*, kesiapan teknis komponen-komponen yang

terkait dengan upaya perbaikan pendidikan. Dengan adanya berbagai upaya perbaikan seperti otonomi pendidikan memang memberikan angin segar bagi kebermaknaan pendidikan. Pengalaman beberapa tahun ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi daerah otonom untuk memperbaiki kinerjanya yang masih kelihatan secara nyata kedodoran diberbagai aspek yang terkait dengan inovasi penyelenggaraan tersebut. *Kedua*, faktor budaya meminta petunjuk yang masih kental kelihatan bagi penyelenggara pendidikan. Malah diberbagai kesempatan wawancara dengan guru menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan, seperti ketidakberdayaan guru untuk merumuskan kurikulum yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikannya, bingungnya menghadapi uji sertifikasi guru dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak boleh terjadi, lebih-lebih dikalangan guru sebagai ujung tombak. Idealisme keguruan, kreativitas, komitmen guru harus tumbuh dalam rangka peningkatan profesinya. Guru kita harus profesional, profesionalisme guru menyangkut minimal tiga hal, yaitu : (i) keahlian (*expertise*), (ii) komitmen dan tanggungjawab (*responsibility*), dan (iii) keterlibatan dalam organisasi profesi

(*involvement in professional organizations*).

Keahlian menyangkut konten keilmuan yang harus dikuasai guru sesuai dengan bidang yang dialami; dan hal ini diperoleh melalui pendidikan formal. Komitmen dan tanggungjawab merupakan nilai profesi yang dianut terkait dengan pelaksanaan tugas (tugas pokok guru) demi kemaslahatan peserta didik. Sedangkan keterlibatan dalam suatu organisasi profesi diperlukan

dalam rangka meningkatkan secara berkelanjutan keahlian maupun komitmen guru terhadap profesinya. Berdasarkan konsep di atas, bila dirumuskan dalam suatu formula, maka profesi guru dapat dirumuskan sebagai fungsi dari keahlian (KA), komitmen (KM), dan kinerja (KR); sehingga dapat diformulasi sebagai berikut: Profesi = f (KA + KM + KR), dan bila digambarkan secara kuadrantik terwujud sbb:



Menyimak berbagai uraian di atas, satu hal yang sangat penting direnungkan dan diresapi oleh penyelenggara pendidikan, adalah kearifan dalam menyikapi berbagai perubahan dan inovasi

tersebut, sehingga tidak timbul kesan kaget, bahkan asing terhadap perubahan-perubahan itu, sebab *it's not a complete change, but a modification*.

DAFTAR BACAAN

Buchori, M., (2000). *Pendidikan Antisipatoris*. Jakarta: Gramedia.
 Delors, J. et al. (1996). *Learning the Treasure Within, Education for*

the 21th Century. New York : UNESCO.
 Depdiknas R.I (2003). *UU SPN RI No. 20 Tahun 2003*. Jakarta: Depdiknas.
 Depdiknas R.I (2005) *PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional*

- Pendidikan.* Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas R.I (2005) *UUGD RI No. 14 Tahun 2005.* Jakarta: Depdiknas.
- Jalal, F. & Supriadi, D., (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Adicpta Karya Nusa.
- Semiawan, C.,(1997). *Perspektif Pendidikan Anak Berbakat.* Jakarta: Grasindo.
- Syarief, I. & Murtadlo, D., (2002). *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru. 70 Tahun H.A.R.Tilaar.* Jakarta : Grasindo.